



Kebijakan Pendidikan : Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru Dan Peserta Didik

Anis Aprianti
Universitas Jambi

Siti Tiara Maulia
Universitas Jambi

Alamat: Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

Korespondensi penulis: anisprnt@gmail.com

***Abstract.** Education always develops along with the times. Thus there are changes in curriculum policies that are always changing according to the times. Curriculum is the essence of the learning process in an educational institution. With changes to the curriculum, a process is needed that involves the entire community in an educational institution. Indonesia has experienced several curriculum changes, including the curriculum in 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 and the independent curriculum. Future education needs to be designed to answer the expectations and challenges of changes that occur. The education system needs to be built continuously from preschool education, basic education, secondary education and higher education. The method used in this study is literature study, namely research that uses material sourced from journals related to education, especially in the curriculum.*

Keywords: Education Curriculum, Policy, Learners.

Abstrak. Pendidikan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian adanya perubahan kebijakan kurikulum yang selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum adalah inti dari proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Adanya perubahan kurikulum, maka dibutuhkan sebuah proses yang melibatkan seluruh civitas di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum, termasuk kurikulum pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013 dan kurikulum merdeka. Pendidikan masa depan perlu dirancang untuk menjawab harapan dan tantangan perubahan yang terjadi, Sistem pendidikan perlu dibangun terus menerus dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Metode yang digunakan dalam kajian ini studi literatur yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan materi yang bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan pendidikan terutama pada kurikulum.

Kata kunci: Kurikulum Pendidikan, Kebijakan, Peserta Didik

LATAR BELAKANG

Pendidikan mempunyai peran penting dalam agen perubahan sosial (*social agent of change*). Pentingnya pendidikan juga termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan secara nasional. Tujuan pendidikan nasional diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia yang religius dan bermoral, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut yang harus dikembangkan salah satunya adalah kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia pendidikan. Kurikulum adalah jantungnya dunia pendidikan di Indonesia. Maka dari itu kurikulum di masa yang akan mendatang merupakan sesuatu yang dirancang untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Dimulai sejak setelah kemerdekaan hingga yang terbaru pada tahun 2021-2022. Kurikulum yang pernah digunakan pendidikan di Indonesia diantaranya kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947), kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952), kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964), kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum berbasis kompetensi 2004 (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 (KTSP), kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum 2021 (kurikulum merdeka).

Pergantian kurikulum ini berdampak pada guru sebagai tenaga pendidik yang belum mampu menggunakan kurikulum baru. Dimana tugas guru harus benar-benar memahami kurikulum baru tersebut beserta komponen-komponennya untuk diterapkan di dalam kelas agar hasil yang diinginkan sesuai dengan harapan. Namun, sebaik apapun kurikulum baru yang sudah dikembangkan, jika guru sebagai tombak di dalamnya tidak dapat menerapkannya dalam proses pembelajaran dengan baik maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan lancar atau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan materi yang bersumber dari jurnal yang berkaitan dengan pendidikan terutama pada kurikulum. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah salah satu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kurikulum

Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang berarti pelari dan *curere* yang berarti jarak yang harus ditempuh. Pada konteks dunia pendidikan biasa disebut *circle of intruction* yang berarti suatu lingkungan pengajaran dimana tenaga pendidik yaitu guru dan peserta didik terlibat di dalamnya.

Kurikulum merupakan alat bantu orientasi pertama bagi peserta didik dalam pelajaran sekolah, yang dapat diatur sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan diimplementasikan dalam pembelajaran. Kurikulum memberikan petunjuk yang cukup rinci mengenai berbagai hal yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah dan guru dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar (Ritonga, 2018). Kurikulum merupakan inti dari proses pendidikan. Kurikulum merupakan bidang yang paling langsung berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Kurikulum sangat menentukan proses dan hasil suatu sistem pendidikan. Kurikulum juga bisa berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan semua tingkat pendidikan (Masyhud, 2014). Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu sistem rencana dan pengaturan serta bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah seperangkat pembelajaran yang terdapat pada suatu instansi pendidikan yang digunakan sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan baik.

Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia

Fungsi dan peranan kurikulum sesuai dengan kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat di klasifikasi menjadi 3 bagian. Menurut Nasution (2009) “Kebijakan itu adalah masa pra kemerdekaan, Kemerdekaan dan reformasi”.

1. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pada Masa Pra Kemerdekaan

Kebijakan ini dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan di kendalikan oleh penjajah.pertama, Kebijakan sekolah kelas dua yang di peruntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis dan membaca. Kedua Kebijakan Sekolah kelas satu yang di peruntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda.Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun.

2. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

a. Kebijakan Rentjana Pelajaran 1947

Kurikulum yang lahir pertama kali setelah pasca kemerdekaan adalah rentjana pelajaran atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *ler plan*. Kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Penerapan Rentjana Pelajaran 1947 memuat ketentuan yaitu: *Pertama*, Bahasa Indonesia digunakan untuk bahasa pengantar di sekolah. *Kedua*, jumlah mata pelajaran untuk Sekolah Rakyat (SR) enam belas bidang studi, SMP tujuh belas bidang studi, SMA jurusan B sembilan belas bidang studi. *Ketiga*, Lahirnya Rentjana Pelajaran 1947 diawali dari pembenahan sistem per sekolahan pasca Indonesia merdeka yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

b. Kebijakan Rentjana Pelajaran Terurai 1952

Kebijakan kurikulum ini memiliki ciri yang menonjol yaitu setiap rencana pembelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. sistem penilaian pada kurikulum ini dilakukan melalui ulangan harian, ulangan umum catur wulan, dan ujian penghabisan.

c. Kebijakan Kurikulum 1964

Pada kurikulum ini yang menjadi ciri yang menonjol adalah pemerintah menginginkan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik sebagai bekal pada jenjang sekolah dasar. Fokus kurikulum 1964 ini pada pengembangan pancawardhana yaitu meliputi daya cipta, rasa, karsa, dan moral.

d. Kebijakan Kurikulum 1968

Kebijakan kurikulum ini muncul karena sebagai perubahan dari kurikulum 1964 yang dipengaruhi oleh sistem politik dari pemerintahan orde lama ke pemerintahan orde baru. Kebijakan kurikulum 1968 merubah struktur pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus.

e. Kebijakan Kurikulum 1975

Kebijakan kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Disini peran guru yaitu wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses pembelajaran berlangsung.

f. Kebijakan Kurikulum 1984

Kebijakan kurikulum 1984 ini mengangkat proses *skill approach*. Ciri yang menonjol pada kebijakan kurikulum 1984 ini adalah terdapat pendekatan pengajaran dimana peserta didik sebagai pusat dan dianjurkan untuk aktif. Dalam kebijakan kurikulum 1984 ini pemerintah menambah mata pelajaran inti yang awalnya berjumlah 8 menjadi 16 mata pelajaran.

g. Kebijakan Kurikulum 1994

Kebijakan kurikulum 1994 lebih menekankan prinsip *link and match* pada sekolah kejuruan. Link and match adalah prinsip tentang pentingnya hubungan pendidikan dengan dunia kerja, sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya dunia Industri juga harus menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga Pendidikan.

3. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

a. Kebijakan Kurikulum 2004 (KBK)

Kebijakan kurikulum 2004 ini dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kebijakan ini memfokuskan pada kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

b. Kebijakan Kurikulum 2006 (KTSP)

Kebijakan kurikulum 2006 sering disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada kebijakan kurikulum ini ciri yang menonjol adalah tenaga pendidik yaitu guru diberi kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi peserta didik dan kondisi lingkungan dimana sekolah itu berada.

c. Kebijakan Kurikulum 2013

Kebijakan kurikulum 2013 ini muncul sebagai pengganti kurikulum KTSP dan untuk melanjutkan pengembangan KBK. Kurikulum 2013 ini diharapkan mampu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan menguatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kurikulum 2013 ini mencakup 3 ranah yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dalam penerapannya terangkai pada kompetensi inti (KI). Sebagai rincian KI-1 (sikap spritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 (keterampilan).

d. Kebijakan Kurikulum Merdeka

Kebijakan kurikulum merdeka belajar merupakan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Dengan adanya kurikulum merdeka, layanan pendidikan bisa dijangkau oleh masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu. Kebijakan kurikulum merdeka belajar diterapkan untuk membantu mengatasi masalah pendidikan yang sering kali terjadi berulang-ulang yang membatasi ruang gerak guru maupun peserta didik dalam mengekskplere diri dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi. Dengan kebijakan ini, diharapkan proses pembelajaran yang berada di sekolah lebih efektif dan efisien.

Dampak Perubahan Kurikulum

Pada dasarnya setiap implementasi kebijakan kurikulum Regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah sangat tergantung pada kemampuan pendidik untuk mengimplementasikannya dengan benar. Implementasi sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi pendidik, dan implementasi pedoman kurikulum yang diamanatkan negara sangat ditentukan oleh kemampuan pendidik untuk menerapkannya dengan benar. Implementasi ini sedikit banyak dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi para tenaga pendidik.

Menurut Lundeberg dan Levin (2003) persepsi dan interpretasi guru terhadap kurikulum berakar pada pengetahuan dan pengalaman guru itu sendiri. Kurikulum setidaknya mencakup empat komponen utama: 1) Tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2) Pengetahuan, ilmu-ilmu, data-data, aktivitas-aktivitas dan pengalaman di mana-mana. 3) Metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka kepada yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang 4) Metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum (Langgulung, 2003).

Perubahan kurikulum dapat membawa dampak positif dan negatif bagi mutu pendidikan. Dampak positif dari perubahan kurikulum tersebut salah satunya adalah peserta didik dapat belajar mengikuti dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Sedangkan dampak negatifnya adalah salah satunya bagi peserta didik, karena kurikulum

cepat berubah maka dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti prestasi peserta didik menurun, karena disebabkan peserta didik belum mampu mengikuti dengan sistem pembelajaran yang baru.

Kebijakan kurikulum yang sering berubah-ubah atau sering diganti tidak hanya memberikan dampak positif dan negatif ke peserta didik karena prestasi menurun, akan tetapi berdampak juga pada sekolah yaitu berhubungan dengan visi misi dan tujuan sekolah. Selain itu perubahan kurikulum membawa dampak negatif tidak tercapainya target pendidikan di sekolah pada awal penerapan. Hal ini disebabkan karena tenaga pendidik belum mampu menerapkan kurikulum baru secara baik. Dimana guru dituntut untuk benar-benar memahami kurikulum baru beserta komponen-komponennya jika ingin menerapkannya dengan hasil yang diharapkan. Namun sebaik apapun kurikulum baru dikembangkan apabila ujung tombaknya yaitu tenaga pendidik atau guru tidak mampu mengimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik maka kurikulum tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dengan baik. Hal tersebut tentunya harus di dorong dengan fasilitas sekolah yang memadai. Di beberapa sekolah kadang fasilitas yang dimiliki menjadi kendala tidak berhasilnya kurikulum baru diterapkan. Dan yang terakhir dampak negatif dari perubahan kurikulum yaitu sosialisasi kepada guru tentang kurikulum baru membutuhkan waktu yang cukup lama. Guru sebagai pelaksana kurikulum di lapangan harus mampu memahami kurikulum baru supaya penerapan kurikulum tersebut berhasil. Hal ini sejalan dengan (Supriani, 2022) bahwa sosialisasi sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang tujuan, capaian yang ingin diraih, dan lain sebagainya dari kurikulum baru. Jika sosialisasi gagal, maka harapan kurikulum akan berhasil juga sangat kecil.

Namun perlu di ingat lagi perubahan kurikulum terjadi karena untuk melengkapi kekurangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum baru dibuat dan di desain untuk menelaah apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya. Perubahan kurikulum juga terdapat penyesuaian dengan perkembangan zaman. Dimana perkembangan zaman sangat berkembang dengan pesat, berbagai aspek kehidupan salah satunya pendidikan sangat membutuhkan adanya perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang muncul. Maka dari itu fungsi kurikulum inilah yang menjawab untuk menghadapi tantangan masa depan akibat perubahan zaman tersebut agar tetap mampu merealisasikan tujuan pendidikan Indonesia.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring dengan perkembangan zaman. Kurikulum adalah perangkat wajib yang menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Perubahan kurikulum seharusnya dapat menjawab berbagai masalah pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Perubahan kurikulum sangat diperlukan seiring perkembangan zaman, karena dengan adanya perubahan dunia pendidikan akan selalu bergerak menuju yang lebih baik lagi, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Setiap kurikulum yang pernah ada di Indonesia pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing.

Namun perlu diingat bahwa tujuan pendidikan Indonesia tidak akan terwujud hanya dengan baik pada satu kurikulum. Aspek lain yang mendukung adalah kualitas tenaga pendidik, sarana belajar mengajar dan lain-lain. Namun perubahan kurikulum di Indonesia dapat dibidang cukup cepat dan membuat suatu anggapan bahwa setiap ganti pemimpin ganti kurikulumnya dimana mengikuti keinginan para pemimpin. Sehingga kurikulum yang satu belum dilaksanakan sepenuhnya sudah berganti lagi dengan kurikulum baru. Sadar atau tidak sadar yang menjadi korban adalah peserta didik dan guru sebagai pelaku kurikulum.

DAFTAR REFERENSI

- Alimuddin, A. M., & Yuzrizal. (2020). Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 7(2), 113–122. <http://conference.kuis.edu.my/pasak2017/images/prosiding/nilaisejagat/10-MAAD-AHMAD.pdf>
- Aprillia, E., Nurhayati, C., & Pandiangan, A. P. B. (2023). Perubahan Kurikulum Pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial (JIPSI)*, 1(4), 2829–272.
- Guanabara, E., Ltda, K., Guanabara, E., & Ltda, K. (n.d.). *Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum terhadap Pembelajaran di sekolah*. 07.
- Machali, I. (1970). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>
- Masyhud. (2014). Perubahan kurikulum di indonesia : studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan islam yang ideal. *Raudhah*, IV(1), 49–70.

- Mawati, A. T., Hanafiah, & Arifudin, O. (2023). Dampak pergantian kurikulum pendidikan terhadap peserta didik sekolah dasar. *Jurnal Primar Edu*, 1(1), 69–82. <https://jurnal.rakeyansantang.ac.id/index.php/primary/article/view/316/89>
- Ritonga, M. (2018). Politics and Policy Dynamics of Changing the Education Curriculum in Indonesia until the Reformation Period. *Bina Gogik*, 5(2), 1–15.
- Suhandi, A. M., & Robi'ah, F. (2022). Guru dan Tantangan Kurikulum Baru: Analisis Peran Guru dalam Kebijakan Kurikulum Baru. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5936–5945. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3172>
- Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>
- Suryaman, M. (2020). *Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. 13–28.